

BAB 1

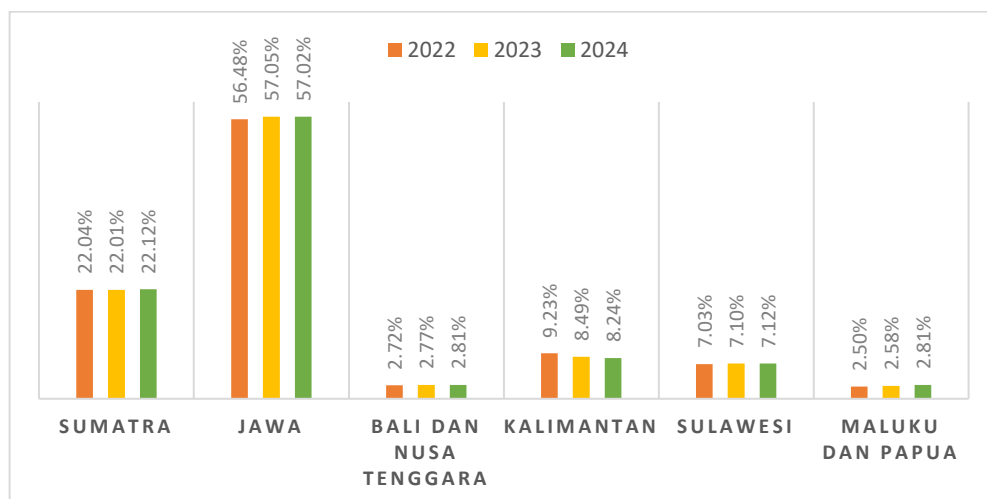
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator penting dalam mengevaluasi kemajuan suatu negara atau wilayah. Di Indonesia, pertumbuhan ekonomi menjadi fokus utama dalam kebijakan pembangunan, karena berkaitan langsung dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Perkembangan wilayah tersebut dapat diukur melalui nilai Produk Domestik Bruto (PDB) di tingkat nasional dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di tingkat daerah. Peningkatan PDB dan PDRB menunjukkan adanya kemajuan ekonomi yang lebih baik, yang berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut (Simangunsong et al., 2023). Pertumbuhan ekonomi mencerminkan peningkatan kualitas hidup di suatu wilayah yang berkaitan dengan kenaikan produksi barang dan jasa.

Robert Solow dan Trevor Swan merupakan dua tokoh ekonom yang mengembangkan model pertumbuhan ekonomi Solow-Swan pada tahun 1956 dalam kerangka teori ekonomi neoklasik. Dalam model ini, faktor-faktor produksi, seperti modal, tenaga kerja, jumlah penduduk, dan kemajuan teknologi, berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi (Sinaga et al., 2024). Ayunani & Nuraini (2025) menyatakan bahwa dalam model pertumbuhan Solow, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ditentukan oleh akumulasi modal dan pertumbuhan tenaga kerja, sementara kemajuan teknologi diperlakukan sebagai variabel eksogen yang tidak dipengaruhi secara langsung oleh aktivitas ekonomi.

Meskipun Indonesia mencatat pertumbuhan ekonomi yang kuat dalam beberapa tahun terakhir, masih terlihat ketimpangan antarwilayah terutama antara Pulau Jawa dan kawasan lain. Data BPS menunjukkan bahwa pada triwulan IV 2024, Pulau Jawa berkontribusi sekitar 57,02 persen terhadap PDB nasional, menegaskan posisinya sebagai pusat ekonomi negara, sebagaimana dilaporkan *Warta Ekonomi.Com* (2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa hasil pertumbuhan belum terdistribusi merata, karena wilayah Pulau Jawa memperoleh porsi manfaat yang jauh lebih besar dibandingkan wilayah lain. Hal ini menunjukkan tingginya ketergantungan ekonomi nasional terhadap Pulau Jawa, dan memperlihatkan adanya ketimpangan antarwilayah maju dan tertinggal. BPS mencatat laju pertumbuhan ekonomi Indonesia paling banyak didorong oleh kontribusi PDRB dari Pulau Jawa, berikut merupakan grafik kontribusi PDRB menurut wilayah di Indonesia pada tahun 2022 sampai tahun 2024.



Sumber : Badan Pusat Statistik (data diolah, 2026)

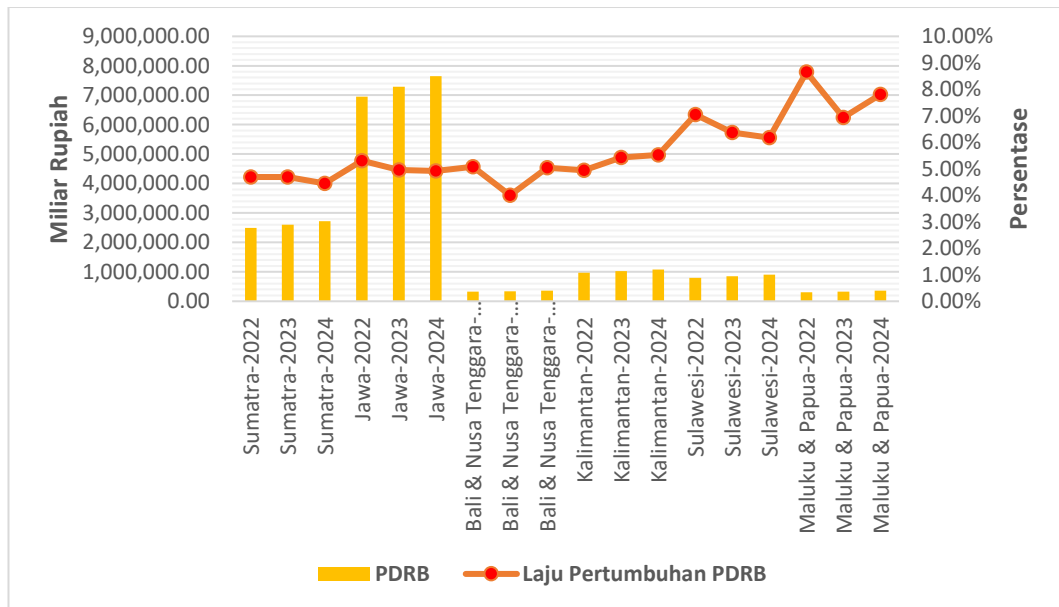
Gambar 1. 1 Kontribusi PDRB Menurut Wilayah di Indonesia Tahun 2022-2024 (Persen)

Berdasarkan Gambar 1.1, terlihat jelas adanya perbedaan yang signifikan antara Pulau Jawa dengan pulau-pulau lainnya di Indonesia. Kontribusi terbesar masih berasal dari Pulau Jawa, yang menyumbang 57,02 persen terhadap perekonomian nasional dan tumbuh sebesar 4,92 persen pada triwulan IV 2024 (BPS, 2025).

Di sisi lain, jumlah penduduk di Pulau Jawa terus meningkat seiring kemajuan ekonomi dan perbaikan kualitas hidup. Sensus Penduduk 2020 mencatat bahwa 56,1 persen dari 270,2 juta penduduk Indonesia tinggal di Pulau Jawa. Jawa Barat menjadi provinsi terpadat dengan 48,27 juta jiwa, disusul Jawa Timur 40,67 juta jiwa dan Jawa Tengah 36,52 juta jiwa (BPS 2021). Atas persentase penduduk di pulau jawa, arus investasi berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM, 2024) atau Kementerian Investasi dan Hilirisasi, total realisasi investasi nasional pada periode Januari-Desember 2024 mencapai 1.714,2 triliun rupiah, di mana sekitar 47,8 persen diarahkan ke Pulau Jawa, menandakan distribusi modal yang tidak seimbang.

Kondisi tersebut menjadi alasan mengapa provinsi dengan penduduk paling sedikit seperti Gorontalo (1,17 juta jiwa), Papua Barat (1,13 juta jiwa), dan Kalimantan Utara (0,70 juta jiwa) memiliki tingkat arus investasi yang cukup rendah. Pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung terpusat di Pulau Jawa karena keberadaan sektor unggulan seperti industri manufaktur, jasa, perdagangan, dan keuangan. Kondisi ini menimbulkan ketimpangan regional, di mana manfaat pertumbuhan tidak terdistribusi merata, sehingga ekonomi nasional masih sangat bergantung pada Pulau Jawa.

Kondisi perekonomian berbagai wilayah di Indonesia dapat dilihat melalui perbandingan grafik antar kontribusi PDRB atas dasar harga konstan dan grafik laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan di enam pulau utama di Indonesia pada tahun 2022 sampai 2024, sebagai berikut.



Sumber : Badan Pusat Statistik (data diolah, 2026)

Gambar 1. 2 PDRB dan Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan di Indonesia Menurut Wilayah Tahun 2022-2024 (Miliar Rupiah & Persen)

Berdasarkan Gambar 1.2, terlihat adanya perbedaan yang signifikan antara Pulau Jawa dengan pulau-pulau lainnya di Indonesia. Pada tahun 2024, PDRB atas dasar harga konstan di Pulau Jawa mencapai 7.652.274,32 miliar rupiah, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Pulau Maluku dan Papua yang hanya sebesar 356.542,87 miliar rupiah. Kesenjangan ini menunjukkan konsentrasi aktivitas ekonomi yang kuat di Pulau Jawa. Meskipun demikian, dari sisi laju pertumbuhan ekonomi tahun 2024, Pulau Jawa justru mencatat pertumbuhan sebesar 4,92 persen, lebih rendah dibandingkan beberapa wilayah luar Pulau Jawa seperti Kalimantan

5,52 persen, Sulawesi 6,18 persen, dan Maluku & Papua 7,81 persen. Perbedaan tersebut mengindikasikan bahwa tingkat aktivitas ekonomi wilayah luar Jawa yang relatif lebih rendah, sehingga setiap peningkatan aktivitas ekonomi menghasilkan persentase pertumbuhan yang lebih besar.

Fenomena ini menarik untuk diteliti karena meskipun Pulau Jawa merupakan pusat ekonomi nasional dengan kontribusi PDRB tertinggi, tetapi laju pertumbuhan ekonominya relatif lebih rendah dibandingkan wilayah lain, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai faktor-faktor yang memengaruhi dinamika laju pertumbuhan ekonomi antarwilayah. Ketidaksesuaian antara besarnya peran ekonomi wilayah dan laju pertumbuhan ekonomi ini mengindikasikan masih adanya hambatan struktural, khususnya melalui kinerja sektor industri manufaktur, tingkat partisipasi angkatan kerja, kualitas sumber daya manusia, serta pemanfaatan internet. Kondisi tersebut tidak hanya mencerminkan pelemahan kinerja ekonomi Pulau Jawa, tetapi juga berpotensi memperlebar ketimpangan pembangunan antarwilayah di Indonesia.

Ketidaksesuaian antara besarnya kontribusi ekonomi wilayah dan laju pertumbuhan ini mengindikasikan adanya hambatan struktural pada sektor industri. Kawasan industri utama di Indonesia sebagian besar terpusat di Pulau Jawa, terutama di Jabodetabek, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, dimana setiap provinsi memiliki karakteristik industri, potensi sumber daya, dan struktur ekonomi yang berbeda (Novia, 2023). Menurut Asmara (2018), Industri manufaktur berperan sebagai penggerak utama ekonomi karena pertumbuhannya merangsang sektor pertanian sebagai penyedia bahan baku dan sektor jasa melalui lembaga keuangan

serta pemasaran, menciptakan lebih banyak lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan masyarakat, sehingga memperkuat pengaruhnya terhadap perekonomian.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2025), pada tahun 2022 laju pertumbuhan PDRB sektor industri manufaktur pada 6 provinsi di pulau jawa mencatat pertumbuhan yang relatif tinggi, seperti Jawa Barat sekitar 7,00 persen dan Jawa Timur sekitar 6,27 persen. Namun, pada tahun 2024 terjadi perbedaan kinerja yang lebih mencolok, di mana Jawa Timur mengalami peningkatan signifikan hingga sekitar 10,81 persen, sementara beberapa provinsi lain justru mengalami kontraksi, seperti DKI Jakarta sekitar -5,69 persen dan Banten sekitar -2,68 persen. Kondisi ini diduga berkaitan dengan faktor struktural seperti meningkatnya biaya produksi, keterbatasan ruang ekspansi kawasan industri di wilayah yang telah mengalami urbanisasi, serta kecenderungan relokasi industri ke daerah dengan biaya produksi yang lebih rendah. Perbedaan tersebut mencerminkan bahwa ketahanan sektor industri manufaktur di Pulau Jawa berbeda antarprovinsi, sehingga kapasitas industri regional berpotensi memengaruhi kontribusi sektor manufaktur terhadap laju pertumbuhan ekonomi regional.

Sektor manufaktur merupakan salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kapasitas produksi. Sektor manufaktur berperan strategis dalam penyerapan tenaga kerja yang dapat mendorong peningkatan pendapatan dan laju pertumbuhan ekonomi (Santacreu & Zhu, 2018).

Seiring dengan pentingnya penyerapan tenaga kerja, salah satu indikator yang perlu diperhatikan adalah tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) yang merupakan indikator penting yang mencerminkan seberapa besar kontribusi penduduk usia produktif dalam kegiatan ekonomi, dan hal ini dapat berpengaruh terhadap laju pertumbuhan ekonomi. Dalam penelitian Firdani et al., (2023) ditemukan bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia, peningkatan TPAK mencerminkan bertambahnya tenaga kerja produktif yang mendorong output nasional, sejalan dengan teori pertumbuhan Solow-Swan. Namun, pengaruh tersebut bersifat kondisional, karena tanpa diimbangi ketersediaan lapangan kerja, peningkatan TPAK berpotensi meningkatkan pengangguran dan menekan pertumbuhan ekonomi.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menurut data BPS (2025) di enam provinsi Pulau Jawa selama periode 2022-2024 mengalami peningkatan yang konsisten di masing-masing wilayah. Pada tahun 2024, TPAK relatif tinggi di beberapa provinsi seperti DI Yogyakarta sekitar 74,78 persen dan Jawa Tengah sekitar 73,74 persen, sedangkan Banten mencatat tingkat yang relatif lebih rendah sekitar 66,17 persen, sebagian besar provinsi mengalami peningkatan TPAK dibandingkan tahun 2022, yang mengindikasikan bertambahnya proporsi penduduk usia kerja yang terlibat dalam aktivitas ekonomi. Perkembangan ini menunjukkan bahwa kapasitas penyerapan tenaga kerja di Pulau Jawa cenderung membaik, meskipun masih terdapat perbedaan tingkat partisipasi antarprovinsi yang dapat

memengaruhi dinamika aktivitas ekonomi dan potensi pertumbuhan ekonomi regional.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) keduanya berperan penting dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi Indonesia. Meskipun tidak terdapat kausalitas langsung antara TPAK dan IPM, keduanya secara bersama mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja dan kualitas sumber daya manusia (Rahmawati & Bintoro, 2019). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memegang peran penting dalam pembangunan ekonomi suatu wilayah. Menurut Yusuf et al. (2022), IPM mencerminkan kualitas kesehatan dan pendidikan penduduk, di mana tingkat kesehatan yang baik meningkatkan produktivitas dan efisiensi ekonomi.

Berdasarkan kategori yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS, 2023), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia dibagi menjadi empat kelompok. Kategori rendah jika IPM kurang dari 60, sedang jika IPM berada antara 60 hingga 70, tinggi jika IPM berada dalam rentang 70 hingga kurang dari 80, dan sangat tinggi jika IPM mencapai 80 atau lebih.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2025), pada tahun 2024 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di enam provinsi Pulau Jawa menunjukkan perbedaan capaian antarwilayah dengan kecenderungan meningkat sejak tahun 2022, DKI Jakarta berada pada kategori sangat tinggi dengan nilai 83,08 diikuti DI Yogyakarta sebesar 81,55. Jawa Barat dan Jawa Timur termasuk dalam kategori menengah dengan kisaran 73-74 sedangkan Banten berada pada tingkat relatif lebih rendah dengan nilai 74,48 dan Jawa Tengah mencatat IPM terendah sebesar 73,88.

Perkembangan ini menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia di Pulau Jawa cenderung membaik, namun masih terdapat perbedaan capaian pembangunan manusia antarprovinsi yang berpotensi memengaruhi produktivitas tenaga kerja serta kapasitas daerah dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi.

Peningkatan IPM yang didukung oleh pemanfaatan internet yang baik memiliki implikasi atau dampak terhadap laju pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan produktivitas. Akses internet yang memadai memperluas kesempatan pendidikan, meningkatkan keterampilan, serta mendorong literasi digital, yang pada akhirnya memperkuat kapasitas tenaga kerja dalam menghasilkan output ekonomi yang lebih tinggi (Jiménez et al., 2014). Selain itu, pemanfaatan internet juga membuka peluang ekonomi digital, seperti *e-commerce* dan pekerjaan berbasis teknologi, yang berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat.

Namun, Penggunaan internet tidak selalu berdampak positif terhadap laju pertumbuhan ekonomi apabila pemanfaatannya lebih dominan untuk kegiatan non-produktif, sehingga tidak mendorong peningkatan output dan produktivitas ekonomi. Hal ini didukung oleh hasil penelitian Kafinas & Shofwan (2025) yang menemukan bahwa peningkatan jumlah pengguna internet berpengaruh negatif dan signifikan terhadap laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia, terutama ketika pemanfaatannya belum diarahkan pada kegiatan ekonomi yang produktif.

Persentase penggunaan internet pada enam provinsi di Pulau Jawa berdasarkan data Badan Pusat Statistika (2025), pada tahun 2024 DKI Jakarta mencatat tingkat penggunaan tertinggi sebesar 87,84 persen, diikuti DI Yogyakarta

sebesar 80,1 persen, yang termasuk dalam kategori tinggi. Jawa Barat dan Banten berada pada kategori menengah dengan masing-masing sebesar 76,62 persen dan 75,17 persen. Sementara itu, Jawa Tengah dan Jawa Timur tergolong relatif lebih rendah. Meskipun demikian, seluruh provinsi mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022, seperti DKI Jakarta dari 84,65 persen dan DI Yogyakarta dari 75,38 persen. Kondisi ini mengindikasikan adanya peningkatan penggunaan internet di seluruh provinsi, namun kesenjangan antarwilayah masih terlihat, di mana daerah dengan infrastruktur dan tingkat urbanisasi yang lebih tinggi cenderung memiliki tingkat penggunaan internet yang lebih besar.

Pulau Jawa merupakan pusat ekonomi nasional dengan kontribusi terbesar terhadap perekonomian Indonesia, namun tingginya konsentrasi aktivitas ekonomi tersebut diiringi oleh berbagai permasalahan struktural, seperti tekanan pada sektor manufaktur, kuantitas dan kualitas tenaga kerja, serta tingkat digitalisasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa dominasi ekonomi Pulau Jawa belum sepenuhnya mencerminkan pertumbuhan yang stabil dan inklusif, khususnya pada periode pascapandemi (2020-2024) yang ditandai dengan perlambatan laju pertumbuhan ekonomi.

Beberapa penelitian sebelumnya, seperti Firdani et al. (2023), Nazilaturrohman et al. (2024) dan Rochmahwati (2023), telah mengkaji pengaruh industri manufaktur, TPAK, IPM, dan penggunaan internet terhadap pertumbuhan ekonomi, namun masih bersifat parsial sehingga belum mampu menjelaskan interaksi simultan antarvariabel dalam dinamika pertumbuhan. Selain itu, keterbatasan periode observasi yang belum secara spesifik menangkap fase transisi

pascapandemi menyebabkan pemahaman terhadap perubahan struktural menjadi kurang menyeluruh. Dengan demikian, terdapat research gap berupa belum adanya pendekatan empiris yang mengintegrasikan faktor struktural, tenaga kerja, dan digitalisasi dalam satu kerangka analisis. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna memperoleh pemahaman yang lebih utuh sebagai dasar perumusan kebijakan yang efektif dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi.

Kebaruan penelitian ini terletak pada tiga aspek utama. Pertama, penelitian ini menggabungkan variabel industri manufaktur, TPAK, IPM, dan penggunaan internet ke dalam satu model empiris untuk menjelaskan variasi laju pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa, sebuah pendekatan yang belum dilakukan oleh studi-studi sebelumnya. Kedua, penggunaan data panel enam provinsi di Pulau Jawa selama periode 2020-2024 memungkinkan analisis yang lebih akurat terhadap variasi antarwilayah sekaligus perubahan tren pertumbuhan pada fase transisi pascapandemi. Ketiga, cakupan periode penelitian yang bersifat terkini menjadikan temuan penelitian ini lebih relevan secara kebijakan, khususnya dalam merumuskan strategi pemulihan dan transformasi struktural ekonomi di Pulau Jawa yang berkelanjutan. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **"Analisis Pengaruh Industri Manufaktur, TPAK, IPM, dan Penggunaan Internet terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi di Pulau Jawa Tahun 2020-2024."**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, terdapat masalah-masalah yang berkaitan dengan penelitian ini. Masalah tersebut diidentifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Industri manufaktur, Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK), Indeks pembangunan manusia (IPM), dan Penggunaan internet secara parsial terhadap laju pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa tahun 2020-2024?
2. Bagaimana pengaruh Industri manufaktur, Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK), Indeks pembangunan manusia (IPM), dan Penggunaan internet secara simultan atau bersama-sama terhadap laju pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa tahun 2020-2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui pengaruh industri manufaktur, Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK), Indeks pembangunan manusia (IPM), dan Penggunaan internet secara parsial terhadap laju pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa tahun 2020-2024.
2. Untuk mengetahui pengaruh industri manufaktur, Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK), Indeks pembangunan manusia (IPM), dan Penggunaan internet secara simultan atau bersama-sama terhadap laju pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa tahun 2020-2024.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat baik untuk pengembangan ilmu maupun praktis yakni sebagai berikut:

1.4.1 Kegunaan Pengembangan Ilmu

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap kajian laju pertumbuhan ekonomi regional dengan memasukkan variabel laju pdrb sektor industri manufaktur, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK), indeks pembangunan manusia (IPM), dan penggunaan internet dalam satu model analisis. Temuan penelitian dapat menambah wawasan akademis mengenai faktor-faktor yang memengaruhi dinamika ekonomi di Pulau Jawa.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori, sehingga dapat dimanfaatkan untuk memperluas penggunaan variabel, memperdalam pendekatan metode, atau memperpanjang periode kajian pada penelitian sejenis di masa mendatang.

1.5 Lokasi dan Jadwal Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Pulau Jawa yang mencakup enam provinsi, yaitu Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur. Penulis melakukan penelitian dengan menggunakan data sekunder dan mengakses *website* resmi Badan Pusat Statistik (BPS).

[illegible]